

## Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Khairul Raziq, Lak lak Nazhat El Hasanah\*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: lak\_lak@uui.ac.id

---

**JEL Classification Code:**

M30, M32, N41

**Kata kunci:**

Ketimpangan Pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum, Jumlah Penduduk.

**Email penulis:**

18313196@students.uui.ac.id

**DOI:**

10.20885/JKEK.vol2.iss1.art2

---

**Abstract**

**Purpose** – This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regional Original Revenue (PAD), District/City Minimum Wage (UMK), and population on the level of income inequality in Yogyakarta Special Region Province.

**Methods** – The research method used is panel data regression with the help of Eviews 9 software with the selected model being the Random Effect Model. **Findings** – Simultaneously, the independent variables affect the dependent variable. While partially, it was found that GRDP had no effect on the level of income inequality, regional own-source revenue had a positive and significant effect, minimum wage and population were found to have a negative and significant effect.

**Implication** – The research results have implications for policies related to regional revenue and the District Minimum Wage in an effort to improve community welfare to minimize income inequality in the Special Region of Yogyakarta.

**Originality** – This study examines income inequality in the Special Region of Yogyakarta with variables of GRDP, local revenue, district minimum wage and population.

---

**Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan jumlah penduduk terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Metode** – Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9 dengan model yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

**Temuan** – Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan secara parsial, ditemukan PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan, upah minimum serta jumlah penduduk didapatkan berpengaruh negatif dan signifikan..

**Implikasi** – Hasil penelitian berimplikasi pada kebijakan terkait penerimaan daerah serta Upah Minimum Kabupaten dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk memperkecil ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Orisinalitas** – Penelitian ini meneliti tentang ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan variabel PDRB,PAD, UMK dan Jumlah Penduduk.

---

## Pendahuluan

Paradigma pembangunan suatu negara atau daerah pada prosesnya tidak terlepas dari masalah pembangunan. Salah satu masalahnya adalah disparitas pendapatan. World Bank (2016) dalam laporannya menyatakan permasalahan itu merupakan satu hal yang sangat kompleks dan serius. Hal itu karena melibatkan berbagai macam aspek, mulai dari aspek manusia, karakteristik alam, hingga kondisi geografis yang berbeda di setiap negara atau daerah. Eksistensi pembahasan mengenai disparitas pendapatan di negara berkembang sudah dilakukan kurang lebih 70 tahun lamanya (Nabila & Laut, 2021). Pembahasan tersebut bertujuan untuk menentukan arah kebijakan perekonomian yang telah terjadi. Bukan suatu hal baru ketika kebijakan perekonomian yang ada cenderung berprioritas pada pertumbuhan ekonomi. Saputri (2017) mengatakan hal itu dapat menyebabkan masifnya tingkat perbedaan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat. Tingginya tingkat perbedaan yang ada dapat mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pemasukan yang merata. Ketika hal itu terus terjadi, maka akan terjadi *gap* (ketidakseimbangan) yang semakin lebar antar masyarakat yang berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah (Amri, 2017). Oleh karenanya penting bagi pemangku kebijakan untuk tidak hanya berpatokan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga melihat dampak sosial yang lebih luas. Distribusi pendapatan yang merata dapat berpengaruh terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ada pada satu region tertentu (Fauza, 2019).

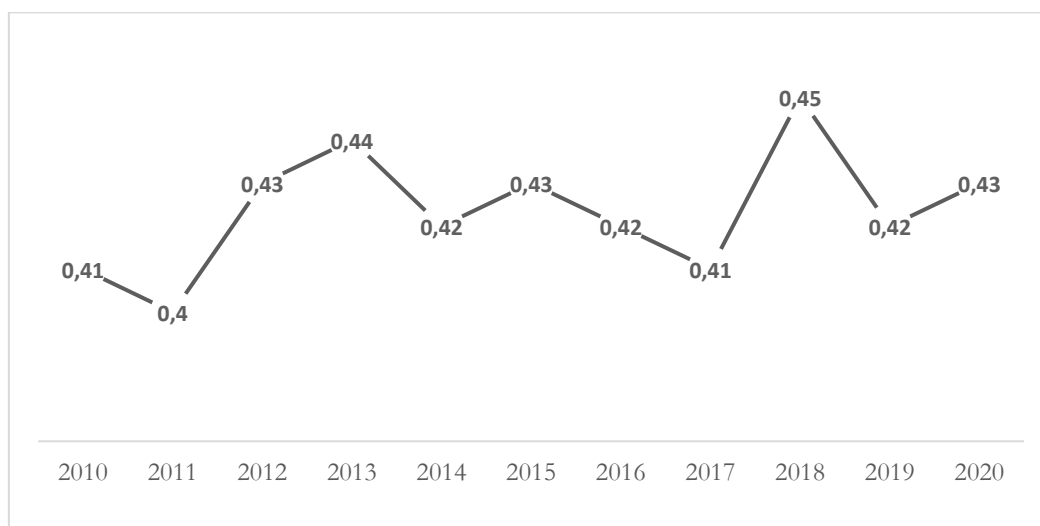
Kondisi pendapatan yang timpang antar region merupakan satu masalah serius. Menurut Ilham & Pangaribowo (2017) eksistensi ketimpangan terjadi dengan banyak aspek yang memengaruhi. Aspek tersebut bukan semata-mata bersumber dari aspek manusia, tetapi juga berasal dari aspek natural seperti kondisi alam, geografis, serta potensi sumber daya alam yang ada dalam satu daerah tertentu. Oleh karena itu, pendapatan yang diterima oleh masyarakat pun terjadi perbedaan, maka dari itu terjadi ketimpangan pendapatan. Gap proses pembangunan juga menjadi salah satu faktor yang mengindikasikan terjadinya ketimpangan. Beberapa area mungkin dapat tumbuh secara signifikan, namun daerah lainnya tidak demikian. Kapabilitas dari masing-masing daerah untuk membangun daerahnya tentu saja berbeda-beda. Dalam proses pembangunan mungkin ada daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun miskin dalam sumber daya manusia. Sebaliknya, ada juga yang kaya dengan sumber daya manusia namun miskin akan kekayaan alam. Hal itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapatan di setiap region dalam suatu negara (Nurpita & Nastiti, 2016).

Studi tentang ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan diantaranya Juliana & Soelistyo (2019) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut BPS (2022) PDRB salah satu acuan penting untuk dapat mengetahui keadaan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu; atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Pada dasarnya, PDRB merupakan akumulasi nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Peningkatan PDRB akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Kusuma et al., 2019). Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan adalah Jumlah penduduk, Jumlah penduduk merupakan akumulasi dari setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Penambahan penduduk dari satu waktu ke waktu lainnya memiliki dua dampak yang berbeda (Arif & Wicaksani, 2017). Merujuk pada teori *population trap* yang dicetuskan oleh Thomas Malthus, keadaan dengan tingkat kehidupan yang sangat rendah akan terjadi ketika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan persediaan makanan yang ada. Hal yang sama diungkapkan oleh Ariadi (2020), ketika pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan maka akan mengakibatkan problematika berupa keterbelakangan dan tidak sejahteranya penduduk yang berujung pada terjadinya ketimpangan pendapatan.

Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi adanya ketimpangan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim dalam Ali & Ningsih (2021) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari dalam kawasannya sendiri yang dikumpulkan sesuai regulasi yang berlaku. Terdapat beberapa sumber dalam pengumpulan PAD itu sendiri: aspek pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan asset daerah yang terpisah (Dermawan, 2017). Ketimpangan pendapatan juga terjadi jika dalam suatu

wilayah memiliki kualitas manusia yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi disuatu daerah juga dapat menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan, dengan masyarakat semakin berkualitas, berpendidikan tinggi maka akan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga akan mempertinggi ketimpangan pendapatan (Rachmawatie 2021). Faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya ketimpangan pendapatan adalah Upah Minimum Kabupaten, adanya Upah Minimum Kabupaten yang tinggi akan memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan, upah yang tinggi cenderung akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat mengkonsumsi barang dan jasa sehingga dapat memberikan kesejahteraan pada kehidupannya. Upah merupakan ongkos yang harus ditanggung oleh pihak produsen dalam waktu proses produksi. Ongkos tersebut sebagai pembalasan terhadap jasa tenaga kerja yang telah disumbangkan dalam aktivitas produksi (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Perbedaan upah antar kabupaten akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Nangarumba (2015) menuturkan peningkatan upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada. Hal itu dikarenakan peningkatan yang ada dapat meminimalisir mobilitas masyarakat, utamanya pada masyarakat dengan pendapatan yang tidak tinggi dan menengah.

Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi dalam skala negara, melainkan juga dapat terjadi dalam skala regional yang luas (Khoirudin & Musta'in, 2020). Namun, nyatanya kondisi itu berbeda di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang notabeneanya hanya mempunyai 5 daerah dengan komposisi 4 kabupaten dan 1 kota. Provinsi DIY justru menjadi satu kawasan dengan tingkat disparitas tertinggi di Indonesia. Kilas balik dalam satu dekade terakhir, di tahun 2013 Provinsi DIY menjadi tertinggi kedua di Indonesia (Astuti, 2015). Tahun 2018 dan 2019 Provinsi DIY masih menjadi yang tertinggi dibanding Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta (Katadata, 2020). Lebih jauh, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS awal 2021 lalu, tercatat rasio gini Provinsi DIY di tahun 2020 ada pada angka 0,437. Angka itu cukup menempatkan Kota Pelajar sebagai provinsi yang mengalami ketimpangan tertinggi di Indonesia ([Harian Jogja, 2021](#)). Adapun perkembangan indeks gini dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:



**Gambar 1.** Perkembangan Indeks Gini Provinsi DIY

Gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Gini Daerah Istimewa Yogyakarta fluktuatif dan tertinggi pada tahun 2018. Berdasarkan uraian masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan mayoritas datanya ada pada bentuk angka (Sugiyono, 2015). Data sekunder didapat dari Badan Pusat Statistik yang diambil dari

tahun 2010-2020 dari 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian terdiri dari 5 variabel yaitu Indeks Gini (Y) sebagai variabel dependen adapun variabel PDRB, PAD, Upah Minimum dan jumlah penduduk sebagai variabel independen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.

**Tabel 1.** Variabel penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Indeks Gini	Mengacu pada Corrado Gini ( <i>International NGO Forum on Indonesia Development</i> , 2019). Indeks gini memiliki besaran nilai antara nol hingga satu.	Persen
PDRB	PDRB yang dipakai dalam penelitian ini didasarkan harga konstan menggunakan tahun dasar/acuan sebagai alat hitung.	Rp (Juta Rupiah)
PAD	Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pemasukan daerah yang didapatkan dari kawasan daerah berkaitan yang komposisinya berupa hasil pengelolaan asset daerah, retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil pendapatan lainnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku	Rp (Ribu Rupiah)
Upah Minimum	Upah Minimum Kabupaten	Rp (Ribu Rupiah)
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk per Kabupaten	Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penelitian ini menggunakan model logaritma natural ( $\ln$ ) sehingga data penelitian konversi menjadi logaritma natural agar parameter dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Penelitian ini mengadopsi pengolahan data menggunakan analisis data kuantitatif dengan metode regresi data panel dengan pengolahan menggunakan program Eviews 9. Widarjono (2018) menjabarkan metode data panel sendiri terdiri atas dua data yaitu *time series* dan *cross-section*. Data *time series* adalah sekumpulan data yang diatur dalam urutan waktu tertentu berdasarkan harian, bulanan, kuartal, hingga tahunan. Sementara data *cross section* adalah sekumpulan data yang dihimpun dari beragam variasi sampel/objek. Penggabungan antara keduanya nantinya akan membentuk data panel dalam jangka waktu tertentu. Lebih jauh, dijelaskan pula data panel cenderung memberi keuntungan, karena hal tersebut akan memberikan *degree of freedom* yang lebih besar. Selain itu, gabungan dari data *cross section* dan *time series* dapat mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*). Pengolahan regresi data panel sendiri terdapat beberapa model yang digunakan, yaitu model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Keseluruhan model tersebut lalu diestimasi melalui regresi data panel. Pada langkah berikutnya dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mencari tahu model mana yang terbaik untuk digunakan dalam proses penelitian.

*Common effect* merupakan model pendekatan data panel yang mengasumsikan perilaku antar data individu tidak berbeda dalam berbagai kurun waktu. Teknik pengolahan dengan pendekatan *common effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Model ini selanjutnya akan diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) (Widarjono, 2018). Bentuk persamaan model *Common effect* dalam penelitian ini adalah:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln PAD_{it} + \beta_3 \ln UMK_{it} + \beta_4 \ln JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- IG = Indeks Gini (persen)
- PDRB = Produk Regional Domestik Bruto (juta rupiah)
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)
- UMK = Upah Minimum Kabupaten (ribu rupiah)
- JP = Jumlah Penduduk (jiwa)
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien Regresi
- $\varepsilon$  = Variabel di luar model
- $i$  = entitas ke- $i$
- $t$  = Periode ke- $t$

Model selanjutnya dalam regresi data panel adalah *Fixed effect Model*, merupakan model pendekatan data panel yang memiliki dua asumsi perbedaan intersep dengan setiap subjeknya (Gujarati, 2012). Asumsi pertama yaitu *slope* bernilai tetap namun intersep bervariasi antar waktu

(*time invariant*) dan asumsi kedua *slope* bernilai tetap namun intersep bervariasi antara unit serta antar periode waktu. Variabel semu (*dummy*) dimasukkan pada model dengan maksud menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Lebih lanjut, selain populer dengan istilah *fixed effect*, model ini dikenal juga dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Berikut persamaan regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect*:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln PAD_{it} + \beta_3 \ln UMK_{it} + \beta_4 \ln JP_{it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_8 D_8 + \varepsilon_{it}$$

Model ketiga *Random effect*, merupakan model pendekatan yang diestimasi menggunakan teknik *Generalized Least Squares* (GLS) dan biasanya disebut dengan *error component* model. Model ini adalah variabel gangguan yang memiliki dua bagian, variabel gangguan yang terjadi antar individu dan variabel gangguan yang terjadi secara universal yang merupakan kombinasi dari *time series* dan *cross section*. Model ini dapat dimanfaatkan sebagai jawaban atas masalah berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada model *fixed effect* (Widarjono, 2018) Berikut persamaan regresi data panel dengan menggunakan model *random effect*.

$$IG_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln PAD_{it} + \beta_3 \ln UMK_{it} + \beta_4 \ln JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$$\beta_{0i} = \bar{\beta}_0 + \mu_i$$

Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga uji yaitu Uji Chow (uji F), uji *Lagrange Multiplier* (LM), dan uji Hausman (Sriyana, 2014). Uji Chow merupakan pengujian yang dilaksanakan dengan membandingkan antara model *common effect* dengan model *fixed effect*. Pengujian menggunakan pendekatan ini diputuskan dengan mengomparasikan antara nilai F kritis dengan nilai F statistik. Ketika dijumpai hasil nilai F-statistik < nilai F kritis, maka gagal menolak H<sub>0</sub> dan dapat disimpulkan bahwa model *common effect* lebih baik dibandingkan model *fixed effect* begitu juga sebaliknya. Pengujian kedua adalah Uji LM dari *Breusch-Pagan* dilakukan untuk memilih antara model *random effect* atau model *common effect* yang menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), dan yang ketiga adalah Uji *hausman*, merupakan uji yang bertujuan untuk memilih model yang paling tepat digunakan antara model *fixed effect* (OLS) dengan model *random effect* (GLS). Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan mengamati nilai Chi-Square statistik dan nilai Chi-Square kritis. Ketika nilai Chi-Square statistik < dari nilai Chi-Square kritis, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H<sub>0</sub>, sehingga model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*. Sementara ketika nilai Chi-Square statistic > Chi-Square kritis, maka keputusan yang diambil adalah menolak H<sub>0</sub> atau menerima H<sub>a</sub> dengan kata lain model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *random effect*.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis regresi data panel pada ketiga model menunjukkan hasil olah data sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random effect	
	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob
C	0.187490	0.5496	-20.44118	0.3080	0.187490	0.5424
LnPDRB	0.002050	0.9016	0.000869	0.9699	0.002050	0.8998
LnPAD	0.065271	0.0000	0.036066	0.0978	0.065271	0.0000
LnUMK	-0.047961	0.0678	-0.216354	0.3325	-0.047961	0.0632
LnJP	-0.032043	0.0429	1.724451	0.3153	-0.032043	0.0395

Langkah selanjutnya dilakukan pengujian pemilihan model yang terbaik untuk analisis penelitian, hasil olah data sebagai berikut:

### Uji Chow

Uji Chow merupakan instrumen pengujian yang digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik. Lihat tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.456906	(4,46)	0.2308
Cross-section Chi-square	6.560503	4	0.1610

Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0.2308 di mana lebih besar jika dibandingkan alpha ( $\alpha$ ) = 5% sehingga dapat diputuskan gagal menolak  $H_0$ . Hasil yang diperoleh menandakan model terbaik yang dipilih untuk uji hipotesis adalah model *Common Effect*.

### Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Uji LM merupakan instrumen pengujian yang digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* sebagai model terbaik dalam penelitian. Hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.251889 (0.6157)	14.24741 (0.0002)	14.49930 (0.0001)

Berdasarkan tabel uji di atas, didapatkan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0.0001 di mana lebih kecil jika dibandingkan alpha ( $\alpha$ ) = 5% sehingga dapat diputuskan  $H_a$  diterima atau menolak  $H_0$ . Hasil yang diperoleh menandakan model terbaik yang dipilih untuk uji hipotesis adalah model *Random Effect*.

### Uji *Hausman*

Hasil analisis pada tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan hasil pemilihan model terbaik adalah *Random Effect* akan tetapi untuk memastikan apakah model tersebut lebih baik dibandingkan dengan *Fixed Effect* maka dilakukan Uji *Hausman*. Penentuan model tersebut dapat diamati melalui probabilitas Chi-Square dengan nilai alpha ( $\alpha$ ). Ketika nilai probabilitas Chi-Square > 0.05 ( $\alpha$  = 5%) maka  $H_0$  akan diterima atau Model *Random Effect* lebih baik dan apabila nilai probabilitas < 0,05 ( $\alpha$  = 5%) maka kita akan menerima  $H_a$  atau Model *Fixed Effect* lebih baik. Hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 5.** Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.827623	4	0.2124

Berdasarkan tabel uji di atas, didapatkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0.2124 di mana lebih besar jika dibandingkan alpha ( $\alpha$ ) = 5% sehingga dapat diputuskan  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_0$ . Hasil yang diperoleh menandakan model terbaik yang dipilih untuk uji hipotesis adalah model *Random Effect*.

Pemilihan model melalui Uji *Chow*, Uji *Lagrange Multiplier (LM)* dan Uji *Hausman* diperoleh model dalam penelitian ini adalah *Random effect*. Hasil analisis diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 6.** Regresi data panel *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.187490	0.305698	0.613318	0.5424
Ln(PDRB)	0.002050	0.016197	0.126583	0.8998
Ln(PAD)	0.065271	0.011437	5.706866	0.0000
Ln(UMK)	-0.047961	0.025239	-1.900260	0.0632
Ln(JP)	-0.032043	0.015152	-2.114803	0.0395
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.28E-08	0.0000
Idiosyncratic random			0.034893	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.600473	Mean dependent var		0.385818
Adjusted R-squared	0.568511	S.D. dependent var		0.054081
S.E. of regression	0.035525	Sum squared resid		0.063101
F-statistic	18.78703	Durbin-Watson stat		1.496474
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.600473	Mean dependent var		0.385818
Sum squared resid	0.063101	Durbin-Watson stat		1.496474

Merujuk hasil estimasi menggunakan Model *Random Effect*, didapatkan persamaan regresi dari model:

$$IG_{it} = 0.187490 + 0.002050 \ln PDRB_{it} + 0.065271 \ln PAD_{it} - 0.047961 \ln UMK_{it} - 0.032043 \ln JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Hasil estimasi yang pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu PDRB, PAD, UMK dan JP dapat menjelaskan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 60% hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.600473, jika dilihat pengaruh simultan variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan diperoleh bahwa secara simultan atau keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang dibuktikan dari probabilitas F sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Secara parsial, pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut:

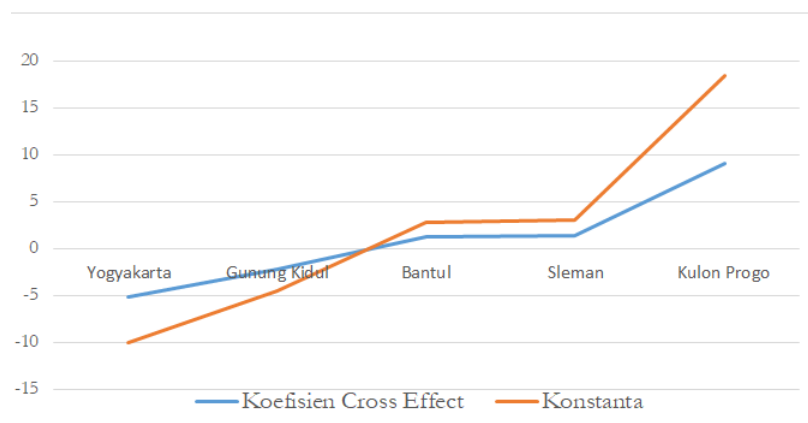
Hasil estimasi variabel PDRB diperoleh nilai koefisien sebesar 0.002050 dengan probabilitas sebesar 0.0998 menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif akan tetapi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun PDRB di DIY tinggi tetapi tidak menurunkan ketimpangan yang ada, meskipun PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan tetapi tidak secara langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Nilai PDRB hanya mencerminkan nilai agregat produksi tetapi tidak memberikan informasi tentang bagaimana pendistribusian antar individu atau kelompok masyarakat, kenaikan nilai PDRB tidak menjamin seluruh masyarakat akan menikmatinya. Lebih lanjut dinyatakan kenaikan tersebut mungkin hanya akan dirasakan oleh masyarakat yang berpendapatan lebih tinggi, sementara masyarakat yang berpendapatan rendah hanya mampu menikmati sedikit dari kenaikan PDRB. Maka dari itu, PDRB dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi DIY (Cahyani, 2019, Sukma, 2021).

Variabel pendapatan asli daerah memiliki probabilitas sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien sebesar 0.065271. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan alpha 5% ( $0.0000 < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai koefisien variabel PAD sebesar 0.065271 bermakna bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.065271 persen. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis dalam penelitian yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan negatif. Temuan pada studi ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawatie 2021), dalam studinya, dijelaskan PAD yang meningkat dapat mengoptimalkan konsumsi daerah yang ada. Namun, di sisi lain PAD yang merupakan wujud desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan juga meningkat apabila penggunaan yang dilakukan tidak optimal. Sebaliknya, ketika penggunaan dilakukan secara optimal secara tidak langsung dapat menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada.

Sedangkan untuk variabel upah minimum kabupaten/kota memiliki probabilitas sebesar 0.0632 dengan nilai koefisien sebesar -0.047961. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dibandingkan alpha 5% namun lebih kecil dibandingkan alpha 10% ( $0.0632 < 0.10$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota (X3) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis data yang telah dilakukan menemukan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil tersebut memberi tanda peningkatan maupun penurunan besaran UMK memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai koefisien variabel UMK sebesar -0.047961 bermakna bahwa setiap kenaikan UMK sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.047961 persen. Temuan pada studi ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Rahman & Putri (2021) dimana upah minimum diklaim berpengaruh karena dapat mendorong daya konsumsi masyarakat dan mampu mengeskalasi sisi permintaan barang dan jasa regional. Lebih lanjut, ketimpangan pendapatan juga dapat diperbaiki melalui peningkatan upah. Melalui hal itu, setiap orang yang bekerja diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkonsumsi lebih dari pendapatan sebelumnya (Maurizio & Varquez, 2016)

Pengujian parsial pada variabel jumlah penduduk dihasilkan nilai probabilitas sebesar 0.0395 dengan nilai koefisien sebesar -0.032043. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan alpha 5% ( $0.0395 < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X4) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis data yang telah dilakukan menemukan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh dan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil tersebut memberi tanda adanya peningkatan maupun penurunan jumlah penduduk memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai koefisien variabel Jumlah Penduduk sebesar -0.032043 bermakna bahwa setiap kenaikan Jumlah Penduduk sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.047961 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis dalam penelitian yang menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan negatif. Temuan pada studi ini sesuai dengan R. Juliana & Soelistyo (2019) yang menemukan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan hasil yang optimal dan tidak menimbulkan permasalahan jika diiringi dengan peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran penduduk. Ketika kedua hal tersebut telah dilakukan maka secara tidak langsung ketimpangan pendapatan dapat direduksi dan jumlah penduduk tidak menjadi masalah bagi suatu daerah (Matondang, 2018). Untuk itulah jumlah penduduk dikatakan dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara *cross-section effect* dapat terlihat tingkat ketimpangan dari yang terendah hingga tertinggi di tiap kabupaten/kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil estimasi *cross effect* adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.** Grafik Hasil *Cross-Section Effect*



Berdasarkan grafik di atas tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo dengan koefisien sebesar 9.298216, disusul Kabupaten Sleman sebesar 1.594894. Sedangkan Kota Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah dengan koefisien sebesar -4.9283757.

## Kesimpulan dan Implikasi

Merujuk hasil analisis regresi data panel dengan model *Random Effect* sebagai model terbaik, maka dapat disimpulkan secara simultan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2010-2020. Secara parsial, PDRB tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif, UMK dan Jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif.

Implikasi penelitian bisa memberikan acuan kebijakan terutama dari hasil penelitian diantaranya kebijakan mengenai penerimaan daerah dalam hal ini adalah PAD. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya desentralisasi fiskal sehingga efektivitas dari pengelolaan ruang fiskal dibutuhkan oleh pemerintah daerah Provinsi DIY agar mendapatkan sumber dana yang potensial untuk peningkatan PAD. Harapannya ketika efektivitas terjadi dapat memberikan efek positif sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang ada. Dari sisi Upah minimum dapat menjadi instrumen untuk mereduksi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi DIY. Pemerintah disarankan untuk dapat memperhatikan dan meningkatkan besaran upah minimum. Selain itu, pemerintah juga butuh mendesain regulasi yang berorientasi pada kenaikan upah. Dengan itu, harapannya dapat membuka akses konsumsi masyarakat yang rendah menjadi tinggi sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang secara perlahan. Sedangkan untuk Jumlah penduduk yang berpengaruh juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat. Kuantitas populasi yang ada dapat menjadi satu hal yang baik jika dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Untuk itu, sedapat mungkin pemerintah mendesain regulasi yang dapat meningkatkan kualitas penduduk yang ada. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk memitigasi pertumbuhan yang tinggi akan tetapi hanya menjadi bumerang bagi keberlangsungan pembangunan yang ada.

## Daftar Pustaka

- Ali, K., & Ningsih, N. W. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. *Derivatif: Jurnal Manajemen*.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1–11.
- Ariadi, V. N. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 485–499.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *6Th University Research Colloquium*, 323–328.
- Astuti, R. D. (2015). Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17–30.
- Cahyani, N. M. . (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017*.
- Dermawan, W. D. (2017). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Edukasi*, 5(2), 153–156.
- Fauza, R. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016.
- Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di

- Indonesia Tahun 2011-2015. *Bumi*, 6(4).
- Juliana, R., & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK Terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 203–300.
- Juliana, Rosita, & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK Terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 293–300.
- Katadata. (2020). Daftar Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1).
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017. *Directory Journal of Economic*, 1.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2255–270).
- Maurizio, R., & Varquez, G. (2016). Distribution effects of the minimum wage in four Latin American countries: Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. *International Labour Review*, 155(1), 97–131. <https://doi.org/http://doi.org/10.1111/ilr.12007>
- Nabila, L. M., & Laut, L. T. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2012-2020. *Syntax Idea*, 3, 8.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.
- Nurpita, A., & Nastiti, A. A. (2016). The Analysis of Development Disparities Inter Districts/ City in Special Region of Yogyakarta (DIY) Province 2003-2013. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.22146/jkap.9934>
- Rachmawatie, D. (2021). Apakah pendapatan asli daerah (PAD) mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 831–838. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15720>
- Rahman, R., & Putri, D. . (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(3), 148–160.
- Saputri, C. (2017). Pengaruh Produktivitas Sektoral dan Laju PDRB terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah pada Tahun 2006-2015. *Riset Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 103–112.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sukma, S. M. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019*. Universitas Islam Indonesia.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96–102.
- World Bank. (2016). Ketimpangan yang Semakin Lebar. *The World Bank Group*, 133.